

Akutulasi Nilai Pancasila dalam Mengatasi Penyalhgunaan Narkoba (Pupuan Bengkulu)

Rita Prima Bendriyanti ¹, Citra Dewi ²

^{1,2} Universitas Dehasen Bengkulu, Jl. Meranti Raya No.32, Sawah Lebar, Ratu Agung, Sawah Lebar Baru, Bengkulu, Kota Bengkulu, Bengkulu 38222, Indonesia

e-mail: rita.prima@unived.ac.id , citravioleta04@unived.ac.id

ARTICLE INFO

Article History:

Received March 22, 2023

Revised April 22, 2023

Accepted May 17, 2023

Keywords:

Actualization, Pancasila,
Narcotics, Pupuan Bengkulu

ABSTRACT

The illicit trafficking and abuse of narcotics in Indonesia have reached alarming levels, with the number of users reaching 5.9 million people. This situation has placed Indonesia in a state of narcotics emergency. Factors such as the vast geographical area and large population have made the country a strategic market for drug trafficking in Southeast Asia. If not addressed immediately, this will pose a serious threat to the future of Indonesia's younger generation. Therefore, a solutive approach is needed by actualizing the values of Pancasila in community life. This study aims to analyze how the actualization of Pancasila values can serve as a solution to combat drug abuse, particularly in the Pupuan Bengkulu region. Through an applicative approach to the five principles of Pancasila, it is hoped that effective strategies can be created to tackle drug trafficking and abuse while strengthening national identity based on Pancasila.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution ShareAlike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

A. Pendahuluan

Penggunaan narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba) di kalangan remaja saat ini dinilai sangat memprihatinkan. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), sekitar 2,2% dari total populasi Indonesia terjerat dalam penyalahgunaan narkoba (AMANDA et al., 2017). Angka ini menunjukkan betapa seriusnya masalah narkoba di Indonesia, terutama di kalangan generasi muda. Fakta di lapangan semakin memperkuat keprihatinan ini, di mana 50% penghuni Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) saat ini adalah mereka yang terlibat dalam kasus narkoba (Eleanora, 1970). Hal ini mengindikasikan bahwa narkoba tidak hanya merusak masa depan individu, tetapi juga menimbulkan beban sosial dan ekonomi yang besar bagi negara.

Penyebaran berita kriminal di media massa, baik cetak maupun elektronik, semakin memperlihatkan betapa luasnya dampak penyalahgunaan narkoba. Berita-berita tersebut kerap diisi oleh kasus-kasus narkoba yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat, mulai dari pelajar, mahasiswa, artis, ibu rumah tangga, pedagang, supir angkot, anak jalanan, hingga pekerja. Fenomena ini menunjukkan bahwa narkoba telah merambah ke semua golongan tanpa memandang usia, profesi, atau status sosial. Remaja, sebagai kelompok yang rentan, menjadi salah satu korban utama dari peredaran gelap narkoba. Hal ini tentu menjadi ancaman serius bagi masa depan bangsa, mengingat remaja adalah generasi penerus yang akan menentukan arah pembangunan negara.

Menyadari besarnya dampak negatif yang ditimbulkan oleh narkoba, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba, khususnya di kalangan remaja. Salah satunya adalah melalui program-program preventif dan rehabilitatif yang digalakkan oleh BNN dan instansi terkait. Namun, upaya tersebut belum sepenuhnya mampu mengatasi masalah ini secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih holistik dan berbasis nilai-nilai luhur bangsa.

Dalam konteks inilah aktualisasi nilai-nilai Pancasila dapat menjadi solusi strategis untuk mengatasi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Pancasila, sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia, mengandung nilai-nilai universal yang dapat dijadikan landasan untuk membentuk karakter generasi muda yang tangguh dan berintegritas. Misalnya, sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, mengajarkan pentingnya spiritualitas dan moralitas sebagai benteng diri dari pengaruh negatif narkoba. Sila kedua, Kemanusiaan

yang Adil dan Beradab, mengingatkan kita akan pentingnya menghargai hak hidup sehat dan bebas dari ancaman narkoba. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, menekankan pentingnya kebersamaan dalam memerangi narkoba sebagai musuh bersama. Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pencegahan narkoba. Sementara itu, sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, menegaskan pentingnya memberikan akses yang adil terhadap pendidikan, kesehatan, dan rehabilitasi bagi korban narkoba.

Dengan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, diharapkan dapat tercipta generasi muda yang memiliki ketahanan diri terhadap pengaruh negatif narkoba. Selain itu, upaya ini juga dapat memperkuat identitas nasional dan semangat kebangsaan, yang pada akhirnya akan mendorong terwujudnya masyarakat Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Oleh karena itu, aktualisasi Pancasila tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat, termasuk keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial.

Pemerintah telah melakukan berbagai bentuk penanganan untuk mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba, terutama di kalangan remaja. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan aktivitas keagamaan, yang diharapkan dapat membentuk ketahanan spiritual dan moral generasi muda. Selain itu, pemerintah juga gencar melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang bahaya narkoba melalui berbagai program yang melibatkan sekolah, komunitas, dan lembaga-lembaga masyarakat. Komunikasi intensif dengan para orang tua juga menjadi fokus penting, mengingat peran keluarga sebagai lingkungan pertama dan utama dalam membentuk karakter anak. Pemerintah juga berupaya merespon secara serius, aktif, dan tepat terhadap kasus-kasus penyalahgunaan narkoba dengan memperkuat penegakan hukum dan menyediakan fasilitas rehabilitasi bagi korban narkoba (Megantara & Syafryadin, 2022). Namun, upaya-upaya tersebut perlu didukung oleh pendekatan yang lebih mendasar, yaitu dengan menginternalisasi nilai-nilai luhur bangsa yang terkandung dalam Pancasila.

Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara Indonesia memiliki nilai-nilai yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat bahkan sebelum Indonesia secara yuridis terbentuk sebagai negara. Nilai-nilai tersebut, seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, telah menjadi

pedoman hidup bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk masalah narkoba. Penanaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sangatlah penting, karena Pancasila tidak hanya menjadi panduan dalam berbangsa dan bernegara, tetapi juga sebagai pandangan hidup yang melekat pada identitas bangsa Indonesia sejak dahulu (Aprianti & Dinie Anggraeni Dewi, 2022). Nilai-nilai Pancasila yang sesuai dengan hati nurani bangsa (Megantara & Syafryadin, 2022) dapat menjadi landasan untuk membentuk generasi muda yang memiliki integritas, tanggung jawab, dan ketahanan diri terhadap pengaruh negatif narkoba. Dengan demikian, aktualisasi nilai-nilai Pancasila tidak hanya menjadi solusi dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba, tetapi juga sebagai upaya untuk memperkuat jati diri bangsa Indonesia di tengah arus globalisasi dan modernisasi.

Secara hierarki, nilai-nilai Pancasila mengajarkan masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan kodratnya sebagai manusia yang beradab dan bermoral. Sebagai dasar negara, Pancasila terdiri dari lima sila yang saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan yang sistematis. Kelima sila tersebut harus dijadikan sebagai sistem moral dan etika yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, serta dalam berbudaya (Oktariani et al., 2022). Pancasila tidak hanya sekadar ideologi negara, tetapi juga mengandung nilai-nilai universal yang dapat dijadikan pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai tersebut mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, yang semuanya mengarah pada pembentukan masyarakat yang harmonis, adil, dan sejahtera. Dalam konteks ini, Pancasila berfungsi sebagai landasan moral dan etika yang mengatur interaksi sosial, politik, dan budaya, sehingga masyarakat dapat hidup sesuai dengan prinsip-prinsip kebangsaan yang luhur.

Pancasila juga memiliki peran penting dalam pembangunan karakter bangsa, yang dapat dilihat melalui tiga fungsi utamanya: sebagai pembangun karakter (*character builder*), pemberdaya karakter (*character enabler*), dan perekayasa karakter (*character engineer*) (Megantara & Syafryadin, 2022). Sebagai pembangun karakter, Pancasila menanamkan nilai-nilai dasar seperti kejujuran, tanggung jawab, dan rasa hormat terhadap sesama. Sebagai pemberdaya karakter, Pancasila memfasilitasi pengembangan potensi individu dan masyarakat melalui pendidikan, sosialisasi, dan praktik nilai-nilai luhur. Sementara itu, sebagai perekayasa karakter, Pancasila berperan dalam

menciptakan sistem dan lingkungan yang mendukung terbentuknya generasi yang berintegritas dan berkarakter kuat. Hal ini menjadi sangat penting karena generasi penerus bangsa adalah cikal bakal yang akan menentukan arah dan masa depan Indonesia. Dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak dini, diharapkan dapat tercipta generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki moral dan karakter yang kuat, sehingga mampu menghantarkan Indonesia menjadi bangsa yang berbudaya, beradab, dan berkarakter Pancasila.

B. Metode

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2022 di Kota Bengkulu, dengan melibatkan 20 orang finalis PUPAN Bengkulu yang rata-rata bertugas di sekolah-sekolah yang berada di daerah terpencil, jauh dari jangkauan kota/kabupaten. Para peserta ini merupakan guru-guru yang mengabdikan di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal), yang menghadapi tantangan dalam mengakses fasilitas dan sumber daya pendidikan modern. Untuk memastikan kegiatan berjalan efektif, metode penyampaian materi dilakukan secara langsung dengan menerapkan standar protokol kesehatan yang ketat. Adapun metode yang digunakan meliputi ceramah, demonstrasi, diskusi interaktif, serta bimbingan terstruktur. Tujuan utama kegiatan ini adalah memperkenalkan teknik pembuatan video pembelajaran berbasis rekaman singkat, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dalam proses perekaman, serta memberikan pelatihan praktis tentang cara mengedit video menggunakan aplikasi sederhana. Dengan demikian, diharapkan para guru dapat menciptakan media pembelajaran yang kreatif dan menarik, meskipun dengan sumber daya yang terbatas.

Rangkaian kegiatan diawali dengan pemaparan teori tentang pembelajaran bola besar oleh narasumber utama, Dr. Rita Prima Bendriyanti, M.Si, beserta tim dari Program Studi PGPAUD. Materi ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang metode pembelajaran yang efektif, khususnya dalam konteks pendidikan anak usia dini (PAUD). Selanjutnya, peserta diberikan pemaparan teori tentang pembelajaran online, termasuk tips mengoptimalkan koneksi internet di daerah terpencil serta kebutuhan praktis dalam proses editing video pembelajaran berbasis rekaman. Kegiatan ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktis, di mana peserta langsung diajak untuk mempraktikkan teknik perekaman dan editing video. Untuk mengukur keberhasilan kegiatan, data dikumpulkan melalui angket yang disebarlangsung setelah acara selesai. Angket tersebut menggunakan

skala Likert, dengan rentang nilai 1 (kurang sekali) hingga 5 (sangat baik), untuk menilai respons peserta terhadap materi dan pelaksanaan kegiatan. Hasil dari kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi guru PAUD di wilayah 3T dalam memanfaatkan teknologi untuk menciptakan media pembelajaran yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan siswa.

C. Hasil dan Pembahasan

Sosialisasi merupakan suatu bentuk kegiatan yang bertujuan untuk menyampaikan informasi kepada pihak-pihak terkait dengan melibatkan narasumber atau infoman yang kompeten dalam topik yang dibahas. Dalam konteks program kerja individu ini, kegiatan sosialisasi dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu penyampaian informasi secara langsung dan transformasi materi ke dalam bentuk lomba. Penyampaian langsung dilakukan melalui metode ceramah, diskusi interaktif, dan tanya jawab, yang memungkinkan peserta untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang topik yang dibahas. Narasumber atau infoman yang terlibat dalam kegiatan ini dipilih berdasarkan keahlian dan pengalaman mereka, sehingga informasi yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan dan bermanfaat bagi peserta. Selain itu, pendekatan ini juga memungkinkan terjadinya interaksi dua arah antara narasumber dan peserta, sehingga peserta dapat mengajukan pertanyaan atau berbagi pengalaman terkait topik yang dibahas.

Selain penyampaian langsung, kegiatan sosialisasi juga dilakukan dengan mentransformasikan materi ke dalam bentuk lomba. Lomba ini dirancang untuk menguji pemahaman dan kreativitas peserta dalam mengaplikasikan informasi yang telah mereka terima. Melalui lomba, peserta tidak hanya menjadi penerima informasi pasif, tetapi juga terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Lomba ini juga bertujuan untuk memotivasi peserta agar lebih serius dalam memahami materi, sekaligus menciptakan suasana yang menyenangkan dan kompetitif. Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, yaitu penyampaian langsung dan lomba, kegiatan sosialisasi diharapkan dapat mencapai tujuan secara efektif, yaitu meningkatkan pemahaman dan kesadaran peserta tentang topik yang dibahas, serta mendorong partisipasi aktif dalam mengaplikasikan pengetahuan yang telah diperoleh.

Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, mengandung nilai-nilai yang dapat digunakan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba. Sila pertama

Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, menekankan pentingnya hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Nilai ini mengajarkan bahwa setiap individu harus menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran agama dan nilai-nilai spiritual yang dianutnya. Dalam konteks penyalahgunaan narkoba, sila pertama ini menjadi landasan moral yang kuat untuk menolak segala bentuk perilaku yang bertentangan dengan ajaran agama. Penyalahgunaan narkoba tidak hanya merusak kesehatan fisik dan mental, tetapi juga dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip agama dan moralitas. Agama pada umumnya melarang segala bentuk perilaku yang merugikan diri sendiri dan orang lain, termasuk penggunaan narkoba. Oleh karena itu, dengan memupuk kesadaran spiritual dan mendekatkan diri kepada Tuhan, seseorang diharapkan dapat membentengi diri dari godaan untuk terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

Penerapan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti meningkatkan ibadah, mengikuti kegiatan keagamaan, dan membangun lingkungan yang mendukung pengamalan nilai-nilai spiritual. Misalnya, sekolah dan keluarga dapat berperan aktif dalam menanamkan nilai-nilai agama sejak dini, sehingga anak-anak dan remaja memiliki fondasi moral yang kuat untuk menolak narkoba. Selain itu, masyarakat juga dapat mengadakan kegiatan keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya narkoba dan pentingnya menjaga diri dari pengaruh negatif tersebut. Dengan demikian, sila pertama Pancasila tidak hanya menjadi pedoman spiritual, tetapi juga menjadi solusi konkret dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, terutama di kalangan generasi muda.

Sila kedua Pancasila, yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, mengajarkan pentingnya menghormati martabat setiap manusia dan menjalani kehidupan dengan penuh kasih sayang serta keadilan. Nilai ini menekankan bahwa setiap individu memiliki hak untuk dihargai, dilindungi, dan diperlakukan secara adil, tanpa diskriminasi. Dalam konteks penyalahgunaan narkoba, sila kedua ini menjadi landasan untuk menyadarkan masyarakat bahwa penggunaan narkoba tidak hanya merusak kesehatan fisik dan mental penggunanya, tetapi juga mengikis nilai-nilai kemanusiaan. Penyalahgunaan narkoba sering kali menyebabkan degradasi moral, kehilangan rasa empati, dan perilaku yang merugikan diri sendiri serta orang lain. Dengan menghargai martabat manusia,

seseorang akan lebih menghargai tubuh dan jiwanya, serta menghindari segala bentuk perilaku yang dapat merusak diri dan lingkungan sekitarnya.

Penerapan nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan. Pertama, pendidikan tentang bahaya narkoba perlu disampaikan dengan cara yang manusiawi dan penuh empati, sehingga masyarakat, terutama generasi muda, dapat memahami dampak negatifnya tanpa merasa dihakimi. Kedua, perlu adanya dukungan sosial dan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba, karena mereka juga berhak mendapatkan kesempatan untuk pulih dan kembali menjadi bagian dari masyarakat. Ketiga, keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial harus menciptakan suasana yang penuh kasih sayang dan saling mendukung, sehingga setiap individu merasa dihargai dan tidak perlu mencari pelarian melalui narkoba. Dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, diharapkan dapat tercipta masyarakat yang lebih peduli terhadap sesama dan mampu menolak segala bentuk penyalahgunaan narkoba

Sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia, mengajarkan pentingnya menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk ancaman narkoba. Penyalahgunaan narkoba tidak hanya merugikan individu, tetapi juga dapat memecah belah masyarakat. Ketergantungan pada narkoba sering kali menyebabkan kerusakan sosial, seperti meningkatnya tindak kriminal, konflik dalam keluarga, dan menurunnya produktivitas masyarakat. Hal ini dapat mengancam stabilitas sosial dan melemahkan persatuan bangsa. Oleh karena itu, dengan mengedepankan semangat persatuan dan kesatuan, seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, hingga individu, dapat bersatu padu untuk mencegah peredaran narkoba dan menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari narkoba.

Penerapan nilai Persatuan Indonesia dalam upaya pencegahan narkoba dapat dilakukan melalui kolaborasi antarlembaga dan partisipasi aktif masyarakat. Misalnya, pemerintah dapat memperkuat penegakan hukum terhadap peredaran gelap narkoba, sementara lembaga pendidikan dan komunitas dapat mengadakan program sosialisasi dan edukasi tentang bahaya narkoba. Selain itu, keluarga sebagai unit terkecil masyarakat juga berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung dan penuh kasih sayang, sehingga anak-anak dan remaja tidak mudah terpengaruh oleh godaan narkoba. Dengan semangat gotong royong dan kebersamaan, kita dapat membangun sistem perlindungan yang kuat

untuk melindungi generasi muda dari ancaman narkoba. Persatuan dan kesatuan bangsa menjadi kunci utama dalam memerangi narkoba, karena hanya dengan bekerja sama kita dapat menciptakan masa depan yang lebih baik bagi Indonesia.

Sila keempat Pancasila, yaitu Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, menekankan pentingnya musyawarah dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Nilai ini mengajarkan bahwa setiap kebijakan atau tindakan harus didasarkan pada pertimbangan yang matang, melibatkan berbagai pihak, dan mengutamakan kepentingan rakyat. Dalam konteks pencegahan narkoba, musyawarah yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah, masyarakat, keluarga, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat, menjadi kunci untuk merancang strategi dan program pencegahan yang efektif. Penyalahgunaan narkoba adalah masalah kompleks yang memerlukan pendekatan holistik dan kolaboratif. Dengan melibatkan semua pihak dalam proses musyawarah, diharapkan dapat tercipta solusi yang komprehensif dan berkelanjutan untuk mengatasi masalah narkoba.

Penerapan nilai sila keempat dalam pencegahan narkoba dapat dilakukan melalui berbagai langkah konkret. Pertama, pemerintah perlu mengadakan forum musyawarah yang melibatkan perwakilan dari berbagai lapisan masyarakat untuk merumuskan kebijakan dan program pencegahan narkoba yang inklusif dan efektif. Kedua, lembaga pendidikan dapat berperan aktif dalam menyusun kurikulum dan kegiatan yang mendidik siswa tentang bahaya narkoba, sambil melibatkan orang tua dan masyarakat dalam proses pengawasan dan pendampingan. Ketiga, masyarakat dapat membentuk kelompok-kelompok diskusi atau komunitas yang fokus pada pencegahan narkoba, sehingga setiap individu merasa memiliki tanggung jawab dan peran dalam upaya ini. Dengan mengedepankan prinsip musyawarah dan kebijaksanaan, diharapkan dapat tercipta sinergi antar-pemangku kepentingan untuk bersama-sama melawan penyalahgunaan narkoba dan membangun lingkungan yang sehat dan aman bagi generasi muda.

Sila kelima Pancasila, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, menekankan pentingnya menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Nilai ini mengajarkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan sumber daya lainnya. Penyalahgunaan

narkoba seringkali muncul sebagai dampak dari ketidakadilan sosial, ketimpangan ekonomi, dan kurangnya akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Ketika masyarakat merasa terpinggirkan atau tidak memiliki harapan untuk masa depan, mereka menjadi rentan terhadap godaan narkoba sebagai pelarian dari masalah yang dihadapi. Oleh karena itu, dengan menciptakan keadilan sosial dan pemerataan kesempatan, diharapkan dapat mengurangi faktor-faktor yang memicu penyalahgunaan narkoba dan membangun masyarakat yang lebih sejahtera.

Penerapan nilai Keadilan Sosial dalam upaya pencegahan narkoba dapat dilakukan melalui berbagai langkah strategis. Pertama, pemerintah perlu memperluas akses pendidikan berkualitas dan layanan kesehatan, terutama di daerah-daerah terpencil dan tertinggal, sehingga setiap individu memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi dirinya. Kedua, program pemberdayaan ekonomi, seperti pelatihan keterampilan dan pembukaan lapangan kerja, dapat membantu mengurangi ketimpangan ekonomi yang sering menjadi akar masalah penyalahgunaan narkoba. Ketiga, perlu adanya dukungan sosial dan rehabilitasi yang komprehensif bagi korban penyalahgunaan narkoba, sehingga mereka dapat kembali pulih dan berintegrasi dengan masyarakat. Dengan menciptakan lingkungan yang adil dan sejahtera, diharapkan dapat memutus mata rantai penyalahgunaan narkoba dan membangun generasi muda yang produktif, sehat, dan berdaya saing.

Narkoba merupakan musuh bersama yang mengancam seluruh umat manusia, termasuk Indonesia. Keberadaannya tidak hanya merusak individu, tetapi juga memberikan dampak buruk yang luas terhadap berbagai aspek kehidupan. Salah satu efek buruk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah memperlebar kesenjangan sosial di masyarakat. Penyalahgunaan narkoba seringkali terjadi di kalangan masyarakat yang kurang beruntung secara ekonomi, sehingga semakin memperparah ketimpangan sosial. Selain itu, narkoba juga merusak kesehatan tubuh, baik secara fisik maupun mental, yang pada akhirnya mengurangi produktivitas dan kualitas hidup penggunanya. Dampak buruk lainnya adalah melemahnya kondisi perekonomian bangsa, karena sumber daya yang seharusnya digunakan untuk pembangunan justru dialihkan untuk menangani masalah narkoba, seperti rehabilitasi dan penegakan hukum. Tidak hanya itu, narkoba juga berdampak pada lemahnya mental generasi muda, yang seharusnya menjadi tulang punggung bangsa di masa depan. Generasi muda yang terjerat

narkoba cenderung kehilangan motivasi, kreativitas, dan semangat untuk berkontribusi bagi kemajuan bangsa.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya yang serius, terstruktur, dan massif dari seluruh elemen masyarakat. Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah dengan mengembalikan nilai-nilai Pancasila ke dalam kehidupan dan kepribadian masyarakat Indonesia. Pancasila, sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, mengandung nilai-nilai luhur yang dapat menjadi landasan untuk membangun kesadaran kolektif dalam memerangi narkoba. Nilai-nilai tersebut, seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial, harus diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, melalui pendidikan karakter berbasis Pancasila, masyarakat dapat dibentuk menjadi pribadi yang tangguh, berintegritas, dan memiliki ketahanan diri terhadap pengaruh negatif narkoba. Selain itu, perlu adanya kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan bebas dari narkoba. Dengan kesadaran kolektif dan komitmen bersama, diharapkan dapat tercipta generasi muda yang sehat, produktif, dan berkarakter Pancasila, sehingga mampu membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik.

D. Simpulan

Penerapan nilai-nilai Pancasila terbukti memiliki potensi besar dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Pancasila, sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia, mengandung nilai-nilai universal yang dapat dijadikan landasan untuk membentuk karakter dan kepribadian masyarakat yang tangguh. Melalui sosialisasi dan edukasi berbasis Pancasila, masyarakat dapat lebih memahami pentingnya menjauhi narkoba dan membangun kesadaran diri secara luas. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui berbagai platform, seperti sekolah, komunitas, media massa, dan kegiatan keagamaan, sehingga pesan tentang bahaya narkoba dapat tersebar secara merata dan efektif. Dengan memahami nilai-nilai Pancasila, seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial, masyarakat diharapkan dapat menginternalisasi prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mampu menolak segala bentuk penyalahgunaan narkoba.

Integrasi nilai-nilai Pancasila dalam program pendidikan, kebijakan sosial, dan rehabilitasi menjadi langkah strategis dalam menciptakan generasi yang

sehat, berkarakter, dan bebas narkoba. Dalam konteks pendidikan, kurikulum berbasis Pancasila dapat dirancang untuk menanamkan nilai-nilai moral, etika, dan tanggung jawab sejak dini. Sekolah dan lembaga pendidikan lainnya dapat menjadi garda terdepan dalam membentuk generasi muda yang memiliki ketahanan diri terhadap pengaruh negatif narkoba. Selain itu, kebijakan sosial yang mengedepankan keadilan dan kesejahteraan masyarakat juga perlu diperkuat, karena ketimpangan sosial dan ekonomi seringkali menjadi pemicu penyalahgunaan narkoba. Program rehabilitasi bagi korban narkoba juga harus mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila, sehingga proses pemulihan tidak hanya fokus pada aspek fisik dan mental, tetapi juga pada pembangunan karakter dan reintegrasi sosial. Dengan pendekatan yang holistik dan berbasis Pancasila, diharapkan dapat tercipta generasi yang sehat, berkarakter kuat, dan mampu berkontribusi positif bagi kemajuan bangsa.

Referensi

- AMANDA, M. P., HUMAEDI, S., & SANTOSO, M. B. (2017). Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse). *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 339–345. <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i2.14392>
- Aprianti, M., & Dinie Anggraeni Dewi. (2022). Kebudayaan Indonesia di Era Globalisasi Terhadap Identitas Nasional Indonesia. *Jurnal Pendidikan*, 6(1), 996–998. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.2294>
- Eleanora, F. N. (1970). BAHAYA PENYALAHGUNAAN NARKOBA SERTA USAHA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGANNYA (Suatu Tinjauan Teoritis). *Jurnal Hukum*, 25(1), 439. <https://doi.org/10.26532/jh.v25i1.203>
- Megantara, A., & Syafryadin, S. (2022). Penanaman Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Upaya Pencegahan Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Pada Masyarakat Desa Kuti Agung Kabupaten Seluma. *Lamahu: Jurnal Pengabdian Masyarakat Terintegrasi*, 1(2), 84–89. <https://doi.org/10.34312/ljpm.v1i2.15922>
- Oktariani, D., Novita Herlissha, Hadis, H., & Saputri, L. (2022). Menerapkan Nilai-Nilai Pancasila Pada Manajemen Sumber Daya Manusia Di Era Globalisasi. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.31316/jk.v6i1.2941>
- Salimi, Y. K., Rumape, O., & Najmah, N. (2023). Pemberdayaan Masyarakat dalam Mengenal Pewarna dan Pemanis Sintetik Berbahaya. *Damhil: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 22–29.